

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Ekonomian Keluarga di Desa Tenggur dan Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan pemberdayaan perempuan terdiri dari tujuh tahap. Tahap pertama ialah persiapan dimana penyiapan petugas dan penyiapan lapangan seperti sosialisasi ,pra rembug , rembug warga. Yang kedua tahap assement yaitu tahapan pengidentifikasian masalah yang dirasakan sasaran program pemberdayaan sekaligus mengidentifikasi sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh sasaran, seperti verifikasi penerima bantuan. Ketiga tahap perencanaan alternatif program dimana pada tahap ini fasilitator atau pendamping kabupaten maupun pendamping desa secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapinya beserta pegagasan memecahannya seperi pembentukan pokmas, Keempat tahap formulasi rencana aksi yaitu fasilitator membantu masing-masing penerima bantuan sasaran pemberdayaan untuk menuliskan ide atau gagasannya dalam bentuk proposal seperti pengajuan pencairan dana. Tahap kelima yaitu pelaksanaan tahap ini dilaksanakan pencairan dana dari pemprov kepada KRTP sasaran melalui desa dan pokmas yang telah

dibentuk, Tahap keenam yaitu evaluasi yaitu kegiatan monitoring terhadap perkembangan usaha yang dijalankan KRTP sasaran, monitoring tersebut dilaksanakan pada bulan ke dua atau ketiga pasca realisasi proram. dan tahap yang terakhir adalah Tahap terminasi pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat sasaran yaitu KRTP.

2. Program Jalin Matra melihat bahwa perempuan menjadi subjek untuk meningkatkan perannya dalam berbagai hal, termasuk pada bidang perekonomian. Sehingga kepala rumah tangga perempuan memiliki peran utama sebagai pelaku ekonomi. Program Jalin Matra menuntut perempuan ikut andil untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui bantuan yang sudah diberikan. Melalui pengawasan dari desa para peserta yang memperoleh bantuan dapat mengembangkan perekonomian mereka. modal yang diberikan dibelikan barang dagangan atau hewan ternak (kambing). Sehingga, mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Serta, mereka dapat menabung untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka. Setelah dirasa cukup mandiri dan taraf perekonomian mereka meningkat maka langkah terakhir yang dilakukan adalah terminasi atau pemutusan hubungan secara formal. Perekonomian mereka tidak diawasi lagi oleh badan pengawas desa maupun pemprov.
3. Sesuai dengan indikator perekonomian rumah tangga yang berbasis islam. pemberdayaan perempuan dalam perspektif ekonomi islam dapat memberikan access (Akses) diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak atau akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua

pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya, *Welfare* (Kesejahteraan) dikatakan salah satu unsur yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, *Consientisation* (Konsientisasi) pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender, *Participation* (Partisipasi) merupakan kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka, dan *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan) Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Husain Syahatah menyebutkan bahwa sistem perekonomian rumah tangga muslim didalam transaksi-transaksinya seperti berinfak, menyimpan atau menabung, kepemilikan, pemberian zakat. Ternyata nilai yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut tidak sebatas pada itu. Namun, terdapat nilai positif yang menyebutkan bahwa perekonomian rumah tangga muslim dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keseharian dan menjadi sumber pendapatan atau tak hanya sebatas pada tambahan. Nilai diatas sangat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Umar Bin Khatab dalam kepemimpinannya. Yakni, negara hadir untuk memberdayakan masyarakatnya, termasuk masalah perekonomian.

Terlebih memberdayakan perempuan adalah salah satu tugas pokok kemanusiaan dalam konsep islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Peran Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) bagi Pemberdayaan Perempuan dan Pendapatan Keluarga dalam Prespektif Ekonomi Islam di Desa Tengkur dan Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat khususnya KRTP sasaran**

Kepala Rumah Tangga Perempuan yang mendapatkan bantuan harus memanfaatkan dan mengoptimalkan program PFK yang bertujuan meningkatkan perekonomian rumah tangganya dan juga masyarakat sekitarnya. Diharapkan setelah program selesai, dengan modal yang telah diterima tersebut KRTP mampu menjalankan, mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri. Sehingga, perempuan menjadi perempuan yang mandiri dan status sosial mereka meningkat.

### **2. Bagi Pemerintah**

Seharusnya pemerintah dalam hal ini lebih mengerti terhadap kebutuhan kepala rumah tangga perempuan, kemampuan dan kemauan KRTP sasaran dalam melaksanakan usaha yang akan dijalankan sehingga ketika program selesai bantuan yang diterimakan kepada KRTP tidak akan hilang atau dijual. Waktu pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan pemerintah dirasa sangat dekat jaraknya jika dilaksanakan dua atau tiga bulan pasca realisasi program, seharusnya monitoring tersebut dilakukan pemerintah minimal satu tahun pasca realisasi

program, sehingga rasa tanggungjawab KRTP untuk tetap mengelola usaha yang dijalankannya masih terpupuk dengan baik.